

**VOLUME : 1**

**No : 1**

**MEI 2018**

Digital Repository Universitas Sumber

**ISSN : 2621-1580**

# IS JURNAL SEJARAH INDONESIA



**DITERBITKAN OLEH :  
PERKUMPULAN PRODI SEJARAH  
SE-INDONESIA**

SUSUNAN REDAKSI  
JURNAL SEJARAH INDONESIA

Pimpinan Redaksi : Prof. Nawiyanto (UNEJ)  
Sekretaris : Dr. Nurul Umamah (UNEJ)

Reviewer : Dr. Purnawan Basundoro (UNAIR)  
Prof. Dr. Hariyono (UM)  
Prof. Dr. Wasino (UNNES)  
Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono (UNDIP)  
Dr. Sri Margana (UGM)  
Prof. Dr. AjadSudrajad (UNY)  
Prof. Dr. Hermanu Soebagjo (UNS)  
Dr. Budi Agustono (USU)  
Dr. Ida Liana Tanjung (UNIMED)  
Dr. Bambang Sulistyono (UNHAS)  
Dr. Linda Sunarti (UI)  
Prof. Dr. Machasin (UIN Sunan Kalijaga)  
Prof. Dr. RezaDienaputra (UNPAD)  
Prof. Dr. H. Ali Mufrodi, M.A. (UIN Sunan Ampel)  
Prof. Dr. Syukron Kamil, M.A. (UIN Syarif Hidayatullah)

Redaksi Pelaksana : Rully Putri Nirmala Puji, S.Pd., M.Ed. (UNEJ)  
Muhamad Shokheh, M.A. (UNNES)  
Rabith Jihan Amaruli, M.Hum. (UNDIP)  
Ilham Daeng Makkelo, M.A. (UNHAS)

Jurnal ini diterbitkan oleh Perkumpulan Prodi Sejarah se-Indonesia (PPSI) dengan durasi terbitan dua kali setahun pada bulan Mei dan November. Redaksi menerima tulisan dalam bidang penelitian sejarah dan pendidikan sejarah oleh para dosen peneliti dan peminat sejarah untuk diterbitkan dalam jurnal ini

Email : [jurnalsejarahindonesia@gmail.com](mailto:jurnalsejarahindonesia@gmail.com)

## PENGANTAR REDAKSI

Melalui perjalanan panjang dan penuh warna, penerbitan media publikasi sejarah sebagai salah satu perwujudan kolaborasi kelembagaan program studi sejarah seluruh Indonesia akhirnya dapat menjadi kenyataan. Media publikasi dengan nama *Jurnal Sejarah Indonesia* (JSI) hadir di hadapan sidang pembaca sebagai salah satu wujud kerjasama di bidang akademis dalam dunia kesejarahan. Kehadiran JSI merupakan realisasi dari program kerja Perkumpulan Prodi Sejarah se-Indonesia (PPSI), yang diamanatkan oleh seluruh program studi yang secara kelembagaan menjadi anggota dan menopang keberadaan perkumpulan profesi sejarah. Melalui penerbitan ini diharapkan jalinan kerjasama dapat semakin meningkat dan lebih produktif dalam memajukan pengkajian maupun pengajaran subyek sejarah di Indonesia.

Dalam terbitan edisi perdana ini, JSI menyapa sidang pembaca dengan menyajikan tulisan-tulisan yang dapat dibagi dalam tiga kelompok besar, yakni historiografi, (re)konstruksi sejarah, dan didaktika sejarah. Kelompok pertama dengan tema historiografi hadir melalui tiga tulisan. Tulisan Nawiyanto mengupas pembaharuan historiografi yang diperjuangkan oleh Aliran Annales yang berawal dari Perancis dan kontribusinya dalam perkembangan pengkajian sejarah. Tulisan Susanto Zuhdi memetakan perkembangan historiografi maritim di Indonesia dengan menekankan aspek teoretis, metodologis dan bahan-bahan pendukungnya, serta mengiskhtisarkan arah dan agenda riset historiografi maritim Indonesia ke depan. Tulisan ketiga oleh Ivan R.B. Kaunang, yang membahas tantangan dan peluang dalam pengembangan historiografi (seni) tari Maengket Minahasa dengan fokus utama terarah pada persoalan sumber dan strategi pemecahannya.

Dalam kelompok kedua yang bisa disebut sebagai sejarah substantif, tersaji tulisan-tulisan yang merupakan hasil (re)konstruksi sejarah yang dikerjakan peneliti sejarah sesuai dengan minat dan perhatian mereka. Tulisan-tulisan dalam kelompok ini cukup beragam. Tulisan Dhanang Respati Puguh mengkaji perjalanan karier dan perjuangan Nyi Suharni Sabdowati untuk diakui eksistensinya dalam dunia seni *pedhalangan*. Tulisan Agus Suwignyo dan Baha'Uddin membahas implikasi pemindahan ibukota Kabupaten Madiun bagi upaya menemukan kembali posisi penting Caruban yang pernah (di)hilang(kan). Sementara itu, tulisan Retno Winarni menyoroti pasang surut sumber penghasilan bupati di Karesidenan Besuki masa kolonial dan adaptasi yang mereka lakukan terhadap perubahan sumber dan besaran penghasilan. Dengan fokus pada era yang lebih

kontemporer dan kelompok masyarakat biasa, tulisan IG Krisnadi dan Dewi Salindri mendiskusikan kondisi sosial-ekonomi dan cara-cara yang dilakukan masyarakat pinggiran kawasan hutan Meru-Betiri untuk menopang kehidupannya. Berikutnya adalah tulisan Nurman Candra Setiansyah yang membahas dampak wabah flu burung dan upaya pengendaliannya di Jawa Timur. Dalam perspektif historis makro, tulisan Sri Ana Handayani menyoroti transformasi makna dan perubahan orientasi nasionalisme Indonesia dari era kolonial hingga era reformasi. Kelompok terakhir adalah tulisan bertema didaktika sejarah, tersaji melalui tulisan Y.R. Surbakti yang mengargumentasikan perlunya revitalisasi pembelajaran sejarah melalui novel-novel sejarah untuk membuat agar pengajaran sejarah di sekolah-sekolah menjadi lebih menarik bagi siswa.

Secara realistis harus diakui bahwa penerbitan edisi perdana JSI merupakan langkah awal yang diambil dengan gelayutan banyak pertanyaan tentang kesinambungan penerbitannya. Banyak jurnal sejarah yang dikelola secara institusional oleh program studi maupun himpunan yang telah terbit, namun tidak sedikit yang terengah-engah atau mati-suri, meskipun semua mengakui penerbitan jurnal merupakan bagian penting atau bahkan pilar yang menopang kehidupan akademis. Realitas ini menyadarkan pengelola JSI akan pentingnya komitmen dan vitalnya dukungan secara nyata dalam beragam bentuk baik dari Pengurus PPSI maupun semua prodi yang menjadi anggotanya. Tanpa komitmen dan dukungan nyata mereka, terbitan perdana ini dipastikan akan langsung terjerembab dalam problem klasik tentang kesinambungan penerbitannya. Semoga setelah edisi perdana ini, edisi-edisi berikutnya dapat menyusul secara teratur sehingga perkembangan dalam riset dan pengajaran sejarah dapat didokumentasi dan dideseminasikan kepada audiens dengan jangkauan yang lebih luas.

DAFTAR ISI

Judul dan penulis	Halaman
Sumbangan Aliran Annales Dalam Pengkajian Sejarah Nawiyanto	1-16
Historiografi Maritim Indonesia Dalam Perspektif Teori, Metodologi dan Sumber Sejarah: Suatu Pemetaan dan Arah Perkembangan Susanto Zuhdi	17-44
Kearah Penulisan Sejarah (Seni) Tari Maengket: Tantangan Ketersediaan Historiografi Ivan R.B. Kaunang	45-59
Menjadi Seperti Dhalang Laki-Laki: Kiprah Nyi Suharni Sabdowati dalam Dunia Seni <i>Pedhalangan</i> Dhanang Respati Puguh	60-79
Politik Pemerintahan Dan Kebijakan Atas Ruang Dalam Penetapan Ibukota-Baru Kabupaten Madiun: Menemukan Posisi Caruban 1830—2017 Agus Suwignyo dan Baha'Uddin	80-103
Raja Kecil Yang Menjadi Pegawai Pemerintah: Pasang Surut Penghasilan Para Bupati di Karesidenan Besuki Pada Periode 1870-1930-An Retno Winarni	104-130
Dalam Kemurahan Hutan Meru Betiri: Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Penyangga Hutan Meru Betiri tahun 1972-1997 IG Krisnadi dan Dewi Salindri	131-156
Pengendalian Wabah Flu Burung Di Provinsi Jawa Timur Periode 2004-2012 Nurman Candra Setiansyah	157-174
Adaptasi dan Perubahan Nasionalisme di Indonesia Sri Ana Handayani	175-189
Revitalisasi Pembelajaran Sejarah Melalui Kajian Novel Sejarah YR Surbakti	190-208



**DALAM KEMURAHAN MERU BETIRI:  
KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PENYANGGA HUTAN  
MERU BETIRI TAHUN 1972-1997**

**IG. Krisnadi dan Dewi Salindri**

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember  
Pos-el: Ignatius.krisnadi@gmail.com

---

**ABSTRACT**

*This article examines the socio-economic conditions of Meru Betiri forest buffer community. The discussion covers the potential of Meru Betiri area, population, livelihoods, facilities and infrastructure, economic activities of buffer-zone community, farming and livestock, tile industry, crafts, collection of forests products like firewood, bamboo, bee honey and wildlife hunting. Meru Betiri's natural generosity has not prospered the people in the buffer villages. The lacks of development of road infrastructure and facilities, low level of education form the causes of poverty in the buffer-zone villages. Poverty and low levels of education shape the perceptions in exploitative forest use, impacting forest destruction, biodiversity extinctions and causing natural disasters. Meru Betiri has changed its role, from protecting and giving "blessings" in the form of natural mercy to causing disaster to the people in buffer villages.*

**Keywords:** Meru Betiri, natural resources, buffer village, encroachments

**ABSTRAK**

Artikel ini mengkaji kondisi sosial-ekonomi masyarakat penyangga hutan Meru Betiri. Pembahasan mencakup potensi kawasan Meru Betiri, penduduk, mata pencaharian, sarana dan prasarana kegiatan ekonomi masyarakat penyangga, aktivitas pertanian dan peternakan, industri genteng, kerajinan gedhek, dan berbagai aktivitas merambah hutan seperti mencari kayu bakar, bambu, madu lebah dan berburu satwa. Kemurahan alam Meru Betiri belum menyejahterakan penduduk di desa-desa penyangga. Minimnya sentuhan pembangunan prasarana dan sarana jalan, tingkat pendidikan rendah merupakan penyebab kemiskinan penduduk di desa-desa penyangga. Kemiskinan dan tingkat pendidikan rendah, membentuk persepsi dalam pemanfaatan hutan yang eksploitatif, berdampak terhadap kerusakan hutan,

kepunahan anekaragam hayati, dan menimbulkan berbagai bencana alam. Meru Betiri berubah peran, dari melindungi dan memberi “berkah” berupa kemurahan alam, berubah memberi musibah bagi penduduk di desa-desa penyangga.

**Kata kunci:** *Meru Betiri, sumberdaya alam, desa penyangga, perambahan hutan*

## PENDAHULUAN

Kajian tentang kehidupan masyarakat di pinggiran hutan Meru Betiri pernah dilakukan beberapa peneliti. Rukiyat (1976) dalam *Survey Suaka Margasatwa Meru Betiri Jawa Timur, Indonesia* mengkaji tindak-perambahan dan penjarahan hutan oleh masyarakat penyangga hutan berdampak bencana alam dan gangguan satwa. Syafi'i dan Kasim (1981) dalam *Tingkat Pendapatan dan Keadaan Sosial Masyarakat Sekitar Hutan di Daerah Mandilis Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember*, mengkaji aspek sosial-ekonomi masyarakat pinggiran hutan Meru Betiri di Dusun Mandilis. Kedua peneliti bersepakat, kondisi masyarakat miskin di Dusun Mandilis, sebagai penyebab tindak penjarahan hutan. Sementara itu, Maksum (1999) dalam *Studi Persepsi Masyarakat Desa Penyangga Taman Nasional Meru Betiri*, memberi gambaran lengkap tindak-penjarahan hutan Meru Betiri dilakukan masyarakat pinggiran hutan, aparat keamanan dan pengusaha. Ia beranggapan, faktor pendorong terjadi perusakan hutan adalah aspek ekonomi, politik, hukum, budaya dan geografis. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam perusakan hutan, semakin mempersulit upaya konservasi (Indrawan, 2012:89-92).

Kajian-kajian tersebut lebih bersifat antropologis maupun sosiologis, dan lemah dalam wawasan historis. Kajian tentang *Dalam Lindungan Meru Betiri: Kehidupan Sosial-ekonomi Masyarakat Penyangga Hutan di Kawasan Meru Betiri Tahun 1972-1997* secara diakronis dan berwawasan historis akan melengkapi dan memperkaya khasanah penulisan sejarah lingkungan khususnya sejarah sosial-ekonomi masyarakat penyangga hutan di kawasan Meru Betiri.

Upaya pemanfaatan hutan di Jawa sebagai sumber devisa negara dimulai sejak masa Kerajaan Mataram Hindu (Abad 7 Masehi). Di dalam berita Fa-shien disebutkan, Kerajaan Holing memanfaatkan hasil hutan seperti penyus, emas, perak, cula badak dan gading gajah sebagai barang cinderamata tamu kerajaan, sehingga kerajaan ini telah mengelola hutan sekalipun bersifat eksploitatif. (Marwati, 1984:93-94). Semasa Kerajaan Majapahit (1292-14780), pengelolaan hutan diserahkan *Juruwana*, dibantu

*Pengalas* yang bertanggung jawab atas pekerjaan pengadaan kayu untuk kebutuhan kerajaan. Pekerjaan penebangan pohon jati dan peremajaan hutan jati diserahkan *Kalang Wadung* (Ayu, 2012:4).

Kedatangan VOC di Nusantara (1602), pengelolaan hutan lebih terorganisir guna memperoleh manfaat ekonomi optimal bagi kepentingannya. Pentingnya nilai kayu jati di pasaran Eropa, menggerakkan keinginan VOC menguasai hutan jati di Jawa dengan dikeluarkan Plakat 8 September 1803 yang mengatur semua hutan kayu di Jawa berada di bawah pengawasan VOC sebagai *domain* (hak milik VOC) dan *regalia* (hak istimewa raja dan para penguasa). Di dalam plakat disebutkan larangan menebang atau menguasai hutan, bagi yang tidak mematuhi aturan, dikenakan hukuman badan. Terbitnya plakat tersebut menunjukkan VOC berkuasa atas hutan di Jawa, dan menjadi “malapetaka” bagi rakyat Jawa karena kehilangan hak ulayat atas hasil hutan (Ayu, 2012:5).

Setelah VOC bubar (1799), Gubernur Jenderal Daendels melakukan peremajaan hutan jati di Jawa yang rusak akibat eksploitasi (VOC). Berdasarkan *Staatsblad* tahun 1829, perbaikan kawasan hutan rusak dilakukan menggunakan cabutan anakan pohon jati dari hutan alam berjarak tanam lima meter setiap tanaman jati. Penduduk pinggiran hutan dilibatkan dalam kegiatan memelihara dan menjaga tanaman jati dari kerusakan, perusakan, pencurian dan perambahan kawasan hutan. Sebagai imbalan, mereka diperbolehkan memanfaatkan kayu limbah dalam hutan (Ayu, 2012:5). Buurman tahun 1883 memperkenalkan sistem tumpangsari untuk peremajaan hutan jati di Jawa dengan melibatkan penduduk di pinggiran hutan untuk menanam kembali bekas hutan yang sudah ditebang habis. Di dalam sistem ini, petani (pesanggem) diberi kesempatan menanam tanaman pangan diantara tanaman pokok (Jati) seperti padi gogo, jagung, lombok, dan tanaman yang dilarang adalah ketela pohong, tembakau, berbagai jenis tanaman merambat yang tumbuh lebih cepat daripada tanaman pokok. Setelah dua tahun, petani diwajibkan menyerahkan andilnya kepada pihak kehutanan dengan keadaan tanaman hutan sehat dan baik, selanjutnya petani memperoleh andil di tempat lain dengan sistem sama (Ayu, 2012:6).

Pemerintah Hindia Belanda selain mengelola hutan jati di Jawa untuk memperoleh keuntungan ekonomi, juga mengelola hutan rimba sebagai Hutan Lindung yang memberi manfaat penting bagi segenap kehidupan. Salah satu upaya perlindungan

hutan yang dilakukannya adalah kawasan Hutan Lindung Meru Betiri berdasarkan Besluit van den Directur van Landbouw Neverheiden Handel pada 29 Juli 1931 Nomor: 7347/B, dan Besluit Directur van Economiche Zaken pada 28 April 1938 Nomor : 5751. Kawasan ini pada tahun 1967 ditunjuk sebagai calon Suaka Alam, dan selanjutnya ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa pada 6 Juni 1972 berdasarkan SK. Menteri Pertanian Nomor : 276/Kpts/Um/ 6/1972 dengan tujuan utama untuk perlindungan satwa jenis *Panthera Tigris Sondaicaly* yang dikenal sebagai Harimau Jawa (Anonim, 1995:5). Kawasan Suaka Margasatwa yang semula seluas 50.000 ha, pada tahun 1982 diperluas menjadi 58.000 ha berdasarkan SK. Menteri Pertanian Nomor: 529/Kpts/Um/6/1982, pada 21 Juni 1982. Perluasan ini mencakup wilayah Perkebunan Bandalit dan Sukamade Baru seluas 2.155 ha, dan kawasan hutan lindung di sebelah utara dan kawasan perairan laut sepanjang Pantai Selatan seluas 845 ha. Pada perkembangan berikutnya yaitu dengan diterbitkan Surat Pernyataan Menteri Pertanian Nomor 736/Mentan/X/1982 pada 14 Oktober 1982 Suaka Margasatwa Meru Betiri dinyatakan sebagai calon Taman Nasional Meru Betiri. Pernyataan ini dikeluarkan bersamaan diselenggarakan Kongres Taman Nasional se-dunia ke-3 di Denpasar, Bali. Akhirnya kawasan ini memperoleh status sebagai Taman Nasional Meru Betiri berdasarkan Surat Pernyataan Menteri Kehutanan Nomor: 277/Kpts-VI/1997 pada 23 Mei 1997 seluas 58.000 ha dengan rincian 37.585 ha berada di wilayah Kabupaten Jember, dan seluas 20.415 ha berada di Kabupaten Banyuwangi (Anonim, 1995:5-6).

Memasuki fase pemerintahan Soeharto (1966-1998), kebijakan nasional pengelolaan hutan dengan memperbolehkan sektor swasta untuk menebang dan mengeksport kayu bulat (log) didasarkan pada UU N0.1/1967 dan UU No.6/1968 tentang investasi asing dan dalam negeri, dan UU Kehutanan No.5/1967 dan PP No. 21/1970 mengenai dasar hukum dibolehkan melakukan konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) selama 20-25 tahun, pematangan kayu log dan industri kehutanan (*plywood*). Kebijakan semacam ini sekalipun sektor kehutanan dapat meningkatkan sumber devisa negara terbesar kedua setelah minyak, namun harus dibayar mahal dengan terjadinya eksploitasi penebangan kayu log secara besar-besaran pada tahun 1970-an yang berakibat kerusakan hutan, dan hilangnya “hak-hak hutan adat” serta termarginalkan sektor sosial ekonomi masyarakat pinggiran hutan (Herman, 2011:35-41). Kondisi semacam ini dialami masyarakat penyangga hutan di kawasan

Meru Betiri. Kemurahanalam Meru Betiri, semestinyadapat mensejahterakan masyarakat pinggiran hutan,namun kebijakan pengelolaan hutan rezim Orde Baru yang lebih berpihak kepada investor,ditambah berbagai aturan konservasi hutan, tidak memberikan kontribusi berarti bagi tingkat kelayakan hidup dan kesejahteraan hidup bagi komunitas masyarakat pinggiran hutan. Bentuk pengelolaan seperti itu, menyebabkan komunitas masyarakat pinggiran hutan tidak memiliki posisi tawar dan kuasa terhadap hutan yang justru berada di sekitarnya. Bahkan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) telah ditawarkan pemerintah dinilai belum optimal memberi manfaat bagi masyarakat pinggiran hutan untuk memperbaiki nasibnya(Hendro, 2003:44-45).

Mengingat terbatasnya ruang, dari sekian banyak permasalahan terjadi di kawasanMeru Betiri sejak ditetapkan kawasan ini berstatus sebagai Hutan Lindung (1931), Suaka Margasatwa (1972), maupun sebagai Taman Nasional Meru Betiri (1997), baik yang menyangkut aspek ekonomi, budaya, hukum, keamanan, politik maupun geografi, tidak mungkin dibahas satu-persatu. Pada kesempatan ini pembahasan difokuskan aspek ekonomi khususnya kondisi sosial-ekonomi masyarakat penyangga hutan di kawasan Suaka Margasatwa Meru Betiri (1972-1997).

## **PEMBAHASAN**

### **1. Potensi Kawasan Meru Betiri**

Informasi tentang kawasan hutan Meru Betiri pertama kali terekamdalam arsipRuy Vaz Pereira (1544).Arsip itu merekampungalaman hidup Juru Taman Paulusketika menjadi prajurit Demak bernama Gelar. Ia ditugaskan Sultan Demak, Trenggono untuk pergi ke Kerajaan Blambangan sebagai mata-mata. Namun secara tidak disengaja bertemu Idayu (Ibu kandung) dan Wiranggaleng (Ayah Angkat) di dalam hutan belantara yang banyak harimau di wilayah Kerajaan Blambangan (Pramoedya, 1995:746-751).Sekalipun arsip itu tidak menyebut namaMeru Betiri, namun Kerajaan Blambangan yang berada di Semenanjung Blambangan, dan kawasan hutan Meru Betiri termasuk Mrawan, Garahan sampai Puger di sebelah barat, dan Kesilir di sebelah timur termasuk wilayah kekuasaannya, bahkan wilayahnya seluruh Eks-Karesidenan Besuki sampai ke Pasuruan. (Anonim,1976: 104-105). Kawasan tersebut dilaporkan oleh Boomgaard

(1876) sebagai kawasan hutan (Wilayah Besuki) yang menjadi “surga bagi harimau dan babi hutan.” Bahkan keberadaan harimau di kawasan ini dianggap sebagai “teror” bagi manusia dan bertanggungjawab atas merosotnya populasi satwa besar serta bertanggungjawab atas ditinggalkan sejumlah desa di Sumberwaru dan Baluran (Nawiyanto, 2012:76). Pemerintah Hindia Belanda melegalkan perburuan harimau sejak akhir abad XIX dan berjalan terus hingga populasi harimau semakin sedikit. Tahun 1940-an “teror” harimau telah menghilang di sebagian besar Jawa (Nawiyanto, 2012:77), bahkan populasinyahanya bisa dijumpai di pegunungan terpencil seperti di hutan Gunung Betiri (Anonim, 1976:9). R. Van der Veen dan Hoogerwef (ahli botani), pada tahun 1971 melakukan penelitian di Meru Betiri, dan melaporkan di kompleks Gunung Betiri terdapat 8 ekor Harimau Jawa, dan merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk melindungi populasi Harimau Jawa yang terancam punah (Anonim, 1976: 10). Pada 6 Juni 1972 kawasan Hutan Lindung Meru Betiri ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa untuk melindungi Harimau Jawa (*Panthera Tigris Sondaical*) dari ancaman kepunahan berdasarkan SK. Menteri Pertanian Nomor: 276/Kpts/Um/6/1972 pada 6 Juni 1972. (Anonim, 1999:23-26).

Upaya perlindungan satwa jenis Harimau Jawa di kawasan Suaka Margasatwa Meru Betiri belum menunjukkan hasil nyata. Kegiatan foto trap dilakukan John Seidensticker (1984) menunjukkan keberadaan Harimau Jawa di kawasan ini diperkirakan tinggal 5 ekor. Namun ketika dilakukan beberapa kegiatan inventarisasi satwa (1990-1994) dilengkapi foto trap, tidak menemukan bukti keberadaannya, sehingga pihak pengelola kawasan beranggapan, keberadaan satwa Harimau Jawa punah. (Anonim, 1995:8-10). Akhirnya, tujuan Suaka Margasatwa Meru Betiri diperluas untuk melindungi berbagai jenis flora dan fauna dari kepunahan akibat ulah manusia.

Kawasan Suaka Margasatwa Meru Betiri membentang dari Teluk Meru-puncak Gunung Betiri (58.000 ha). Secara administrasi pemerintahan, kawasan ini berada di Kabupaten Jember dan Banyuwangi. Adapun batas-batas kawasan meliputi: sebelah utara berbatasan dengan PT. Perkebunan Nusantara XII, Kebun Malangsari dan hutan Perum Perhutani, sebelah timur berbatasan Desa Kalisanen, kawasan PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Sumberjambe, PT. Perkebunan Treblasala dan Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, sebelah selatan berbatasan Samudera Indonesia, sebelah barat berbatasan kawasan hutan Perum Perhutani PT. Perkebunan

Nusantara XII Kebun Kalisanen, Kebun Kota Blater, Desa Sanenrejo, Desa Andongrejo dan Desa Curahnongko (Anonim, 1995:4).

Menurut hasil penelitian Hoogerwerf tahun 1971, di kawasan Suaka Margasatwa Meru Betiri terdapat 5 tipe vegetasi (pantai, hutan mangrove, hutan rawa dataran rendah, rheophyte, hutan tropis), 364 jenis flora, 14 diantaranya dilindungi, dan 181 jenis fauna, 41 diantaranya dilindungi (Sutikto, 1998:1). Anekaragam hayati flora, fauna di kawasan Suaka Margasatwa Meru Betiri menjadi obyek penelitian bagi para peneliti, dan berperan sebagai laboratorium alam untuk pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan konservasi. Selain itu kawasan ini memiliki panorama alam indah dilengkapi aneka flora dan satwanya yang atraktif (Wisata Penyu Pantai Sukamade, Pantai Bandealit, Pantai Rajegwesi, Wisata Banteng dan aneka satwa lain di Nanggelan, Baluran, Teluk Penyu, Teluk Permisian), sehingga kawasan ini sangat cocok untuk rekreasi dan berpotensi sebagai pengembangan pariwisata.

## 2. Penduduk, Matapencarian, Sarana dan Prasarana Kegiatan Ekonomi

Pemukiman penduduk penyangga hutan Meru Betiri menempati tanah seluas 196.294 ha (0,338%) dari seluruh luas kawasan (58.000 ha) meliputi 4 desadi wilayah Kabupaten Banyuwangi (Sarongan, Kandangan, Kebonrejo, Kalibaru Kulon), dan 8 desa di wilayah Kabupaten Jember (Andongrejo, Curahnongko, Wonoasri, Sanenrejo, Curahtakir, Mulyorejo, Pace, Sidomulyo). Pemukiman tersebut tersebar di Kebun Pantai Bandealit (1.048 ha), di Lodadi (2.020 ha), di Sumbersalak-Darungan Pantai Bandealit (7.125 ha), di Desa Sarongan (156.532 ha), di Dusun Rajegwesi (29.569 ha) (Anonim, 1995: 13). Berikut data persebaran penduduk desa-desa penyangga hutan Meru Betiri seperti dalam tabel berikut.

Tabel: 1 Persebaran Penduduk Desa-desa Penyangga Hutan di Kawasan Meru Betiri Tahun 1996

No.	Nama Desa	Luas (Km Persegi)	Jumlah Penduduk		Jumlah (Jiwa)	Kepadatan
			Laki- laki	Perempuan		
<b>A Kab. Jember</b>						

1.	Curahnongko	283.390	2.883	2.833	5.716	20.17
2.	Curahtakir	77.863	5.517	5.908	11.425	14.67
3.	Andongrejo	262.790	2.683	2.826	5.509	20,96
4.	Sanenrejo	88.946	2.889	2.981	5.870	47.70
5.	Wonoasri	6.180	4.841	4.765	9.606	0.64
6.	Mulyorejo	192.245	5.558	5.589	11.147	17.25
7.	Pace	93.972	2.780	2.905	5.685	16.53
8.	Sidomulyo	107.516	3.542	3.630	7.172	14.99
<b>B</b>	<b>Kab. Banyuwangi</b>					
9.	Sarongan	27.001	2.892	2.978	5.870	21.74
10.	Kandangan	18.064	18.064	4.205	8.628	47.76
11.	Kebonrejo	33.221	3.975	3.994	7.969	4.17
12.	Kalibaru Kulon	37.962	13.119	13.284	26.403	1.44

Sumber: Anonim, 2011. *Laporan Kegiatan Penyusunan Baseline Data Model Desa Konservasi Taman Nasional Meru Betiri*. Jember: Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Balai Taman Nasional Meru Betiri, hlm. 8.

Mata pencaharian penduduk penyangga hutan Suaka Margasatwa Meru Betiri sebagian besar bertani sistem tadah hujan, karena selain daerahnya berdataran tinggi juga belum tersedia fasilitas irigasi (Sarengat, 23 Oktober 2013). Sebagian besar yang tinggal di Dusun Bandalit (Desa Curahtakir) dan di Dusun Sukamade (Desa Sarongan) bekerja sebagai buruh di PT Perkebunan Bandalit dan PT Perkebunan Sukamade Baru. Mereka yang tinggal di pinggiran Pantai Bandalit dan Rajegwesi bekerja sebagai nelayan, dan merekayang tinggal di Dusun Krajan, Desa Sarongan sebagian besar bertani, dan sebagian lain bekerja membuat gula kelapa (Sunaryo, 23 Oktober 2013).

Kondisi tempat tinggal penduduk di desa-desa penyangga hutan Meru Betiri secara umum tidak layak huni menempati rumah berfentilasi buruk, berdinding bambu, berlantai tanah dan lembab. Tiang rumah sebagian terbuat dari bambu dan kayu, atap rumah berupa genteng (Ruslan 20 Oktober 2013). Sebagian besar rumah memiliki kamar tidur tidak berpintu, hanya ditutup kain kelambu (Jumriah 20 ktober 2013). Berikut

disajikan data jumlah penduduk dan kondisi rumah warga desa-desa penyangga hutan Meru Betiri seperti dalam tabel berikut.

Tabel 2 Jumlah Penduduk dan Kondisi Rumah Warga di Desa-desa Penyangga Hutan Meru Betiri di Wilayah Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Tahun 1996

No	Keterangan	Curah nong- ko	Sanen- rejo	Ando ng- rejo	Wono- asri	Curahta kir	Jumlah
1	Penduduk	5.716	5.870	5.509	9.606	11.425	38.126
2	Kepala Keluarga	1.700	1.485	1.292	1.894	2.579	8.950
3	Rumah Bata-ubin	552	135	229	802	314	2.032
4	Rumah Semi Bata-ubin	372	59	633	950	544	2558
5	Rumah Gedhek	79	1.234	225	-	1.814	3.352
R A T I O							
6	Penduduk/Rmh/Orang	5,69	3,82	5,86	4,37	3,82	4,46
7	Kepala Keluarga/Rumah (KK)	1,69	1,04	1,19	1,08	0,97	1,13
8	Jumlah Rumah Gedhek (%)	7,88	86,41	20,70	0,00	67,89	42,21

Sumber: Sutikto, T, dkk. 1998. *Profil Kawasan Penyangga Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember*. (Buku II: Laporan Kemajuan). Jember: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tingkat II Jember dengan Lembaga Penelitian Universitas Jember, hlm. 36.

Tabel tersebut menunjukkan, kondisi rumah di tiap-tiap desa penyangga hutan Meru Betiri di wilayah Kecamatan Tempurejo menjadi salah satu indikator kekurangmampuan penghuninya, sekalipun masih ada faktor-faktor lain yang menentukan. Diantara ke-5 desa tersebut, warga Desa Sanenrejo paling banyak menghuni rumah-rumah gedhek (86,41%), disusul warga Desa Curahtakir sebanyak (67,89%). Kedua desa ini (1996) termasuk kategori desa miskin di Kabupaten Jember (Sunaryo, 20 Oktober 2013).

Kondisi prasarana dan sarana baik fisik maupun non-fisik merupakan modal dasar masyarakat di desa-desa kawasan penyangga hutan Meru Betiri untuk

melaksanakan aktivitas perekonomian. Namun kondisi prasarana dan sarana tersebut (1997) belum memadai dalam menunjang kegiatan perekonomian warga, sehingga ikut menciptakan kemiskinan masyarakatnya. Desa Sanenrejo memiliki prasarana perdagangan terbesar berupa toko, kios atau lainnya sebanyak 74 buah (81,08%). Desa Andongrejo dan Wonoasri tidak memiliki pasar, Penduduk kedua desa ini pada umumnya memanfaatkan pasar di lokasi desa terdekat, dan kedua desa ini memiliki prasarana perdagangan yang relatif kecil, sehingga pelayanan kebutuhan penduduk baik sebagai konsumen maupun produsen menjadi terhambat dan akses aktivitas perekonomiannya melemah, karena akan terjadi biaya transaksi tinggi (Jumari, 11 Nopember 2013). Sarana jalan yang digunakan sebagai penunjang aktivitas perdagangan di desa-desa penyangga hutan Meru Betiri di wilayah Kecamatan Tempurejo sampai tahun 1997 pada umumnya hanya memiliki jalan berjenis makadam dan tanah, dan ada satu desa yang mempunyai jalan beraspal (4 km) yaitu Desa Wonoasri.

Kondisi jalan setiap desa penyangga hutan Meru Betiri di wilayah Kecamatan Tempurejo, sebagian besar berupa jalan makadam rata-rata berkisar 72%-88%, jalan tanah berkisar sepanjang 23 km (88,46%), jalan tanah 3 km (11,54%), dan jalan beraspal sepanjang 4 km. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan aktivitas perekonomian di kawasan Meru Betiri berupa jalan, alat transportasi, pertokoan, kios, pasar, juga sarana dan prasarana keuangan formal yang tersedia adalah berupa Bank Perkreditan Rakyat. Bank ini terdapat di Desa Curahnongko, Desa Sanenrejo dan Desa Curahtakir, sedangkan dua desa lain, Wonoasri dan Desa Andongrejo belum memilikinya (Ponirin, 21 Oktober 2013). Keberadaan prasarana keuangan yang tidak memadai mengakibatkan kebutuhan keuangan penduduk terpenuhi atas jasa keuangan informal (Ijon, rentenir). Sementara itu keberadaan Koperasi Unit Desa di desa-desa penyangga hutan Meru Betiri sampai tahun 1997 hanya terdapat di Desa Curahnongko (Sunaryo 20 Oktober 2013). Keberadaan Ijon atau rentenir di desa-desa penyangga hutan kawasan penyangga hutan Meru Betiri dirasa sangat memberatkan warga desa, karena tingkat bunga tinggi sampai 20% dan bunga berbunga. Menurut Kepala Dusun Mandilis, Desa Sanenrejo, Sarengat (20 Oktober 2013), warga setempat terpaksa memanfaatkan jasa keuangan informal tersebut karena belum tersedia lembaga fasilitas keuangan formal seperti Koperasi Unit Desa.

### 3. Mereka yang Bertani dan Beternak

Sebagian besar penduduk di desa-desa kawasan hutan Meru Betiri bekerja sebagai petani dengan kepemilikan lahan sangat sempit bahkan sebagian besar diantara mereka tidak mempunyai lahan garapan atau mereka hanya bekerja sebagai buruh tani. Berikut disajikan data tataguna dan pemanfaatan lahan di desa-desa penyangga hutan Meru Betiri tahun 1997 seperti dalam tabel berikut.

Tabel 3 Tataguna dan Pola Pemanfaatan Lahan di Desa-desa Penyangga Hutan Meru Betiri Tahun 1997

Kabupaten/ Kecamatan Desa	Jumlah / KK	Luas Pemilikan lahan (Ha)						Luas pemilikan lahan(Ha/KK)
		Sawah	Hutan	Perke- bunan	Tegal	Bangun an/ halaman	Lainnya	
Kab. Banyuwangi								
Kec. Pesanggaran								
Desa Sarongan	1.491	278,6	12,25	1.097,1	185,75	103,75	15	1,6
Desa Kandangan	2.716	471,4	11.114,9	5.974,2	171	165	19	6,9
Kec. Kalibaru								
Desa Kebonrejo	3.336	220	4.154,9	859.769,5	10	1.899,77	0	2,5
Desa Kalibaru Kulon	1.826	255	0	143	188	15,48	0,8	2.428,2
Kab. Jember								
Kec. Tempurejo								
Desa Andongrejo	1.361	60,174	2,5	2,5	170,02	33,51	1.0137	20,1
Desa Curahnongko	1.716	60,274	2,5	2.114	153,42	9.142	6	16,5
Desa Wonoasri	2.948	0	0	207,9	248,37	127,199	37,9	0,2
Desa Sanenrejo	1.657	355,7	6	0	180,121	87,050	29,9	5,5

Desa Curahtakir	4.375	234	3896,5	2.81	183	139	529,6	2,3
Kec. Sempolan								
Desa Mulyorejo	3.321	15	0	2.634	1.874	73,00	255	1,5
Desa Pace	5.863	103	0	1.439	468	190	2.927	0,9
Desa Sidomulyo	2.817	150	0	1.511	639	112	2.733	1,8
J u m l a h	33.427	2.203,2	42.416,4	877.702,1	4.470,7	12.087,8	7.556,9	2.488.1
Rata-rata	2.785,6	183,6	3.534,7	73.141,9	372,6	1.007,3	630,6	207,3

Sumber :Anonim, 1995. *Rencana Pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri 1995-2020* (Buku I). Jember: Proyek Pengembangan Taman Nasional Meru Betiri Tahun Anggaran 1994/1995, hlm.45.

Berdasarkan tabel tersebut diketahui,Desa Kebonrejo sebagai desa yang memiliki jumlah KK terbanyak (3336 KK), dan memiliki areal hutan (4.154,9 ha), kebun (859.769,5 ha) bangunan/halaman (1.899,7), areal sawah (220 ha), sehingga setiap KK di desa ini hanya memiliki lahan seluas 2,5 ha. Sementara itu Desa Wonoasri yang terdiri 2948 K, sebagian besar wilayahnya terdiri atas hutan (248,37 ha), tegal (248,37 ha), dan bangunan/halaman (127,199 ha) dan tidak memiliki sawah teknis dan hutan, sehingga kepemilikan lahan setiap KK di desa ini paling sedikit (0,2 ha) jika dibandingkan ke-12 desa lainnya. Desa Andongrejo yang terdiri atas 1.361 KK memiliki sawah 60,174 ha, hutan 2,5 ha, dan kebun 2,5 ha dan tegalan 170,02, 33,51 ha, setiap KK memiliki lahan paling seluas (20,1 ha) jika dibanding ke-12 desa lainnya.

Berapa rata-rata penghasilan petani di desa-desa penyangga hutan Suaka Margasatwa Meru Betiri? Upaya menghitung pernah dilakukan Tim Peneliti Universitas Jember (1997). Perhitungan menunjukkan hasil produksi tanaman pangan di desa-desa penyangga hutan Meru Betiri (1997) secara keseluruhan setiap tahun sebesar Rp 6.203.855,200. Namun prediksi total pendapatan bersih di sektor pertanian tanaman pangan hanya 25% dari pendapatan kotor. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat produktivitas lahan kurang menguntungkan dan faktor biaya produksi tinggi. Jika dikonversi dengan luasan setiap hektar per tahun dapat menghasilkan pendapatan bersih setiap petani dalam setiap tahun sebesar Rp. 1.888.344,25.(Sutikto,1998:46-47).Rata-rata

kepemilikan tanah setiap petani seluas 2.073 ha (Lihat Tabel 3), maka rata-rata penghasilan bersih setiap petani dalam satu tahun Rp 3.914.54 atau Rp.32.621 dalam setiap bulannya. Penghasilan ini berada jauh di bawah UMR Jawa Timur tahun 1997 sebesar Rp. 132.500 (UMR Propinsi Jawa Timur Tahun 1997, Bappenas). Walaupun demikian, petani masih mempunyai penghasilan tambahan dari usaha ternak, buruh tani atau menjual tenaga dari berbagai pekerjaan yang ditawarkan. Tingkat upah buruh tani pada saat itu (1997) sebesar Rp.4000 per hari, namun tidak sepanjang tahun buruh tani dapat bekerja, karena tenaga kerjanya dibutuhkan pada saat musim tanam atau musim panen (Sutikto,1998:47).

Sektor peternakan banyak dimanfaatkan oleh warga penyangga hutan Meru Betiri, walaupun belum dimanfaatkan secara optimal sebagai pekerjaan utama. Mereka masih memanfaatkan sektor peternakan sebagai pekerjaan sampingan. Jenis ternak yang terbanyak sapi, kambing, ayam. Sapi dan kambing menjadi jenis hewan ternak paling diminati, karena banyak tersedia lahan rumput. Populasi ternak terbanyak terdapat di Desa Sanenrejo sebanyak 15899 ekor, dan Desa Andongrejo sebanyak 10309 ekor. Pada umumnya masyarakat kurang mampu secara ekonomi memelihara sapi dengan cara *menggaduh* atau bagi hasil dengan pemilik sapi. Menurut Bunasir (20 Oktober 2013), di dalam sistem *gaduh* terdapat aturan yang disepakati secara turun-temurun, pihak pemilik ternak menyediakan hewan ternak untuk dipelihara pihak *penggaduh*. Pihak pemilik hewan ternak menerima hasil terlebih dahulu dari anak hewan ternaknya, sedangkan pihak *penggaduh* menerima hasil ternak berikutnya. Jika hewan ternaknya beranak lebih dari satu, maka hasilnya dibagi dua dengan pihak *penggaduh* (Saswoko, 21 Nopember 2013). Di kawasan penyangga hutan Suaka Margasatwa Meru Betiri tersedia lahan rumput luas, berpotensi untuk dibudidayakan ternak sapi atau kambing. Namun sistem pengelolaan ternak yang masih tradisional masih dianggap sebagai pekerjaan sampingan. Hasil penelitian Tim Unej tahun 1997 menunjukkan perhitungan kasar per tahun usaha ternak sapi sebagai berikut: Modal per ekor Rp. 400.000,- dengan biaya pemeliharaan Rp.150,- karena rumput tidak beli, setelah dipelihara setahun diperkirakan terjual Rp. 1.000.000,- sehingga laba kotor per ekor Rp. 450.000. (Sutikto,1998:47). Jika budidaya ternak dilakukan dengan sistem *gaduh*, maka hasilnya Rp.450.000 dibagi dua=Rp 225.000 untuk pemilik sapi, dan Rp. 225.000 untuk *penggaduh*. Atau dengan sistem bagi hasil anak lembu yang harganya pada saat itu

(1997) ditaksir per ekor berkisar antara Rp.100.000-Rp.125.000,-(Paeman, 11 Nopember 2013).

#### 4. Industri Genteng

Industri genteng di desa-desa kawasan penyangga hutan Suaka Margasatwa Meru Betiri dapat dijumpai di Desa Sanenrejo tepatnya di Dusun Krajan dan Dusun Mandilis. Industri genteng di kedua dusun tersebut dapat berkembang didukung oleh tersedianya bahan baku berupa tanah liat dan kayu bakar yang memadai. Jenis genteng yang diproduksi di kedua dusun di Desa Sanenrejo adalah genteng pres atau genteng karangpilang.

Proporsi biaya terbesar jenis industri ini terletak biaya tenaga kerja sekitar 52 % dari total biaya keseluruhan yang dibutuhkan. Sedangkan proporsi terbesar kedua terletak di sektor faktor produksi kayu bakar yang menyerap lebih kurang 24 % dari total biaya keseluruhan. Sedangkan serapan biaya atas komponen yang dibutuhkan, maka di sektor tenaga kerja akan memberikan tambahan pendapatan bagi penduduk setempat dan sekaligus mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Selain faktor tenaga kerja dan bahan baku, faktor lainnya adalah harus tersedia bahan kayu bakar. Ketersediaan kayu bakar cukup banyak dan dengan harga yang relatif murah. Hal ini akan menyebabkan rendahnya harga jual genteng. Harga kayu bakar yang murah disebabkan lokasi industri genteng yaitu Desa Sanenrejo sebagai salah satu desa yang berada di kawasan penyangga hutan Meru Betiri yang banyak menyediakan bahan kayu bakar.

Industri genteng di Desa Sanenrejo melibatkan 360 pengrajin dengan jumlah tungku sebanyak 60 buah. Setiap tungku rata-rata dikelola oleh tiga tenaga kerja. Sepanjang tahun rata-rata setiap tungku pembakar dapat beroperasi sebanyak lebih kurang enam puluh kali pembakaran dengan perincian pada saat musim kemarau (April-Oktober) setiap tungku dapat beroperasi enam kali dalam sebulan. Pada musim penghujan sebanyak tiga kali dalam sebulan. Dalam setahun di Desa Sanenrejo terjadi 360 kali pembakaran dengan rata-rata kapasitas sekali pembakaran adalah 4000 buah genteng, sehingga dalam setahun dapat menghasilkan 1.440.000 unit genteng. Jenis produksi genteng terbagi atas dua jenis yaitu genteng pres dan genteng karangpilang. Total produksi setahun 37% diantaranya adalah jenis genteng karangpilang (9.000.000

buah per tahun), sedangkan sisanya adalah jenis genteng pres sebanyak 5.400.000 buah per tahun. Harga per unit genteng pres rata-rata Rp.70, dan genteng karang pilang Rp140 per unit. Omset penjualan dalam setahun adalah sekitar Rp.1.360.000.000, jika nilai omset ini dikurangi biaya produksi sebesar Rp.824.175, maka margin keuntungan yang diterima sekitar 40 %nya (Rp 561.825.000). Jika dirata-rata setiap pengrajin genteng di Desa Sanenrejo akan mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp. 1.560.625 per tahun, sehingga jika dibandingkan dengan sektor pertanian, sektor industri genteng lebih besar memberikan pendapatan warganya.

### **5. Pengrajin Gedhek**

Industri kerajinan gedhek di desa-desa penyangga Suaka Margasatwa Meru Betiri berjumlah sebanyak 18 orang tersebar di Desa Andongrejo 4 pengrajin, Desa Sanenrejo, dan Desa Curahtakir sebanyak 10 pengrajin. Industri pembuatan gedhek banyak tergantung sektor tenaga kerja (65,7%) dan bahan baku bambu (34%). Industri gedhek tergantung tingkat skill pengrajin dan ketersediaan bahan baku. Pengrajin gedhek memperoleh bahan baku tidak melalui pembelian, melainkan mencari ke hutan. Setelah bahan didapat, pengrajin memproses menjadi anyaman bambu. Total jumlah produksi dalam unit per tahun 3.744 lembar dengan harga jual antara Rp 2500 – Rp. 3000 per lembar. Omset penjualan dalam setahun keuntungan diperoleh Rp 11.2322.000. Total biaya sebesar Rp 6.522.000, sehingga keuntungan diperoleh dalam setahun Rp 4.680.000 (41,6%). Sebenarnya nilai penjualan diterima pengrajin sama dengan pendapatan bersih, karena tidak ada biaya bahan baku dan tenaga kerja. Meskipun hasil kelihatan besar dan menjanjikan, namun kebutuhan pasar tidak menjanjikan, sehingga penghasilan pengrajin tidak optimal (Paeman 11 Nopember 2013).

Di Desa Andongrejo diperkirakan setiap pengrajin dalam setahun hanya menghasilkan sebesar Rp 624.000 atau jika dikonversikan per hari, maka pendapatan rata-rata pengrajin per hari sebesar Rp 1.750. Pendapatan tersebut terlalu kecil untuk dijadikan andalan memenuhi kehidupan keluarga. Berkenaan dengan itu, pada umumnya tenaga kerja yang terlibat dalam industri ini berlatar belakang pendidikan rendah, usia lanjut, wanita dan pada umumnya tidak memiliki lahan sawah dan selain membuat kerajinan bambu, mereka bekerja sebagai buruh tani atau mencari tambahan

penghasilan di hutan. Alasan mereka membuat gedhek adalah karena relatif tidak membutuhkan tenaga yang besar, sehari ke hutan, sehari membuat gedhek di rumah. Dalam setahun untuk memenuhi kebutuhan pengrajin gedhek di kawasan pengangga hutan Meru Betiri dibutuhkan bahan baku berupa bambu Wuluh sebanyak 112.320 batang. Sementara itu, untuk membuat selebar gedhek dibutuhkan 30 batang bambu Wuluh. Jika satu batang bambu seharga Rp 10.000, maka kebutuhan bambu dalam setahun seharga Rp. 11.232.000. Tingkat kebutuhan bahan baku bambu yang sedikit, dipengaruhi oleh faktor rendahnya permintaan gedhek. Hal ini diperjelas jika dibandingkan dengan kemampuan pencari bambu dalam sehari umumnya bisa mencapai 300 batang.

#### **6.Mencari Kayu Bakar di Hutan**

Pengambilan kayu bakar oleh penduduk di kawasan hutan Meru Betiri tidaksulit, karena kayu bakar yang diambil bekas kayu-kayu tebang di hutan jati yang berbatasan langsung dengan desa-desa sekitarnya. Pengambilan kayu bakar di hutan diantaranya untuk keperluan industri rakyat (Pembuatan genteng, tempe, tahu)maupun untuk konsumsi rumah tangga. Kebutuhan terbesar kayu bakardigunakan untuk industri genteng. Di Desa Sanenrejo terdapat usaha pembuatan genteng yang membutuhkan 18.000 meter kubik untuk setiap tahun atau setara dengan Rp.225.000.000 (Sutikto dkk. 1998:70). Transportasi untuk membawa kayu bakar biasa dilakukan dengan menggunakan sepeda yang mempunyai daya angkut maksimal 0,4 meter kubik (Paidi 11 Nopember 2013). Jumlah kebutuhan kayu bakar setahun jika disetarakan sama dengan 45.000 sepeda. Jika diasumsikan bahwa setiap orang (sepeda) hanya sekali dalam sehari mengangkut kayu bakar maka tenaga kerja pencari kayu bakar yang terlibat khususnya untuk memasok kebutuhan industri genteng di Desa Sanenrejo rata-rata sejumlah 125 orang dengan pendapatan rata-rata per hari Rp. 5.000 (Sutikto dkk. 1998:68).. Pengambilan kayu bakar yang melalui Desa Sanenrejo umumnya tidak sampai keluar kawasan penyangga, umumnya pengambilan untuk keluar dari kawasan penyangga hutan melewati Desa Andongrejo dan Curahnongko. Di desa tersebut tidak terdapat pengepul kayu bakar, sehingga cara keluarnya kayu bakar dapat dilihat secara jelas dengan beriring-iringan sepeda dengan tujuan daerah industri genteng di Ambulu dan sekitarnya ataupun untuk keperluan konsumsi rumah tangga di daerah daerah yang

dilewatinya (Paidi 11 Nopember 2013). Penjualan kayu bakar yang keluar kawasan penyangga hutan Meru Betiri sulit untuk diperkirakan besarnya, namun berdasarkan pengamatan di lapangan tidak kurang dari enam puluh sepeda melalui jalur Andongrejo yang diperkirakan setara dengan 24 meter kubik dalam sehari (Sutikto dkk.1998:69).

Menurut seorang pencari kayu bakar di hutan, Tomiri (11 Nopember 2013), pencarian kayu bakar dapat dilakukan sepanjang tahun, tetapi pengambilannya lebih disesuaikan dengan permintaan pasar. Saat ramai adalah pada musim kemarau terutama industri genteng dapat memproduksi secara optimal, di musim hujan proses produksi berkurang yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi permintaan kayu bakar. Pekerja-pekerja yang terlibat dalam pencarian kayu bakar pada umumnya saat musim kemarau, sedangkan pada saat musim penghujan, sebagian diantara mereka berhenti mencari kayu bakar, dan bekerja sebagai buruh tani yang memperoleh upah lebih banyak.

Selain warga di pinggiran hutan mencari kayu bakar di hutan untuk kebutuhan industri rakyat, mereka pergi ke hutan mencari kayu bakar bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan sendiri, melainkan untuk dijual. Kebutuhan kayu bakar untuk konsumsi rumah tangga (memasak) mencapai 108.273,6 meter kubik senilai dengan Rp 1.353.420.000 untuk setiap tahunnya. Dari sejumlah itu (108.273,6 meter kubik), 54,30% (58.886,64 meter kubik) senilai Rp 734.907.060 berasal dari kawasan hutan. (Sutikto dkk. 1998:71)

### **7. Mengambil Bambu di Hutan.**

Jumlah populasi bambu sulit dideteksi secara tepat dikarenakan pengambilan sebagian besar digunakan untuk bahan yang diperdagangkan dan para pencari bambu rata-rata masuk hutan 6-7 kali seminggu, berangkat pagi pulang sore dan frekuensi pengambilan bambu dilakukan sepanjang tahun (Paeman 11 Nopember 2013). Apabila persediaan tanaman bambu di daerah penghasil bambu menipis/habis, maka para pencari bambu semakin masuk ke hutan untuk mencari bambu. Cara pengangkutan bambu diangkut dengan sepeda yang disiapkan di pinggir kawasan hutan. Pekerjaan ini menjadi prospektif bagi warga, karena hasil hutan tersebut sudah mempunyai penampung khusus desa-desa sekitarnya. Berikut disajikan data hasil perambahan hutan bambu oleh

penduduk penyangga hutan Meru Betiri di wilayah Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember seperti dalam tabel berikut.

Tabel 4 Hasil Bambu Perambah Hutan Di Desa-desa Penyangga Hutan Meru Betiri Di Wilayah Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Tahun 1997

No	Desa	Jumlah Pengepul	Hasil/Mg (Btg.pgl)	Hasil/Thn (Batang)	Harga/Btg (Rp)	Hasil/Thn (Rp)
1	Curahnongko	1	40.000	1.760.000	12.5	22.000.000
2	Sanenrejo	2	80.000	3.520.000	12.5	44.000.000
3	Andongrejo	1	40.000	1.760.000	12.5	22.000.000
4	Curahtair	10	120.000	5.280.000	12,5	66.000.000
5	Wonoasri	-	-	-	-	-
Jumlah		14	280	12.320.000		154.000.000

Sumber: Sutikto, T, dkk. 1998. *Profil Kawasan Penyangga Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember*. (Buku II: Laporan Kemajuan). Jember: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tingkat II Jember dengan Lembaga Penelitian Universitas Jember, hlm. 73.

Tabel tersebut menunjukkan jumlah pengepul bambu di seluruh kawasan penyangga Meru Betiri di wilayah Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sebanyak 14 orang (Paeman 11 Nopember 2013). Yang terbanyak dari Desa Curahtakir (10 pengepul). Total hasil hutan Bambu yang diperjual-belikan dalam setahun adalah sebanyak 12.320.000 batang seharga 154.000.000, sehingga jika dikonversikan dalam sehari maka dibutuhkan sebanyak 34.222 batang, dan jika setiap pencari bambu dalam sehari menghasilkan 300 batang, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut diprediksikan sekitar 114 orang pencari bambu dengan pendapatan rata-rata setiap pencari bambu Rp.3750 per hari.

Pencarian bambu pada umumnya melewati Desa Sanenrejo dan Curahtakir, diperkirakan hal ini terjadi dari kawasan penyangga hutan Meru Betiri umumnya bambu diangkut dengan truk yang mempunyai kapasitas angkut sebesar 1000 batang (Paemanan 11 Nopember 2013). Pengambilan bambu dilakukan sepanjang tahun, namun pada musim penghujan jumlah pencari bambu cenderung menurun, karena yang

menjadi pencari bambu cenderung lebih memilih sektor pertanian sebagai buruh tani sebagai andalan pekerjaannya. Berbeda dengan pencari kayu bakar yang sebagian berasal dari luar daerah kawasan, para pencari bambu sebagian besar berasal dari daerah penyangga hutan Meru Betiri. Kebutuhan Bambu Wuluh untuk konsumsi industri gedhek sangat kecil, hal ini terkaitkan produktivitasnya juga sedikit. Untuk keperluan industri gedhek dalam setahun hanya dibutuhkan sebesar lebih kurang 1.173.176 batang atau senilai Rp.11.731.768 (Sutikto dkk.1998:72). Untuk memenuhi kebutuhan bambu bagi pengusaha gedhek umumnya tidak melalui pengepul tetapi bahan baku diperoleh dengan mencari di hutan. Rincian konsumsi Bambu Wuluh berdasarkan jumlah pengepul yang ada di kawasan penyangga hutan Meru Betiri dapat dilihat pada tabel berikut.

Penduduk di desa-desa penyangga hutan Meru Betiri mencari bambu jenis Bubat digunakan untuk glantang pada pengeringan tembakau Besuki Na Oost. Oleh karena itu pengambilan bambu sangat tergantung pada permintaan produsen tembakau Besuki Na Oost. Seorang pengambil bambu Bubat setiap hari rata-rata mendapatkan 75 batang dengan harga per batang Rp 50, sehingga jadi pengambil bambu Bubat per hari memperoleh pendapatan sebesar  $75 \text{ batang} \times \text{Rp } 50 = \text{Rp } 3.750$ , sedangkan waktu yang digunakan untuk pergi ke hutan 4-5 kali per minggu. Penduduk di desa-desa penyangga hutan di Meru Betiri mencari bambu jenis Lampar digunakan sebagai bahan pembuat sujen tembakau. Pengambilan bambu Lampar sebanyak 20 batang per hari untuk tahun 1997. Cara membawa dengan mengalirkan lewat Sungai. Dari 20 batang bambu tersebut akan menghasilkan sujen seberat 50 kg. Harga 1 kuintal antara Rp 5.000-6.000, sedangkan per minggunya rata-rata mengambil sebanyak 3-4 kali dengan waktu yang dibutuhkan 8-9 jam (Sutikto dkk. 1998:72).

### **8. Perambah Hutan Madu Lebah**

Madu lebah yang diambil penduduk di desa-desa penyangga hutan Meru Betiri dikenal sebagai madu berkualitas baik, dan dikenal sebagai Madu Curahnongko. Pengambilan madu dilakukan antara Juni-Oktober. Berikut disajikan penghasilan perambah madu lebah hutan di kawasan penyangga Meru Betiri di wilayah Kecamatan Tempurejo tahun 1997 seperti dalam tabel berikut.

Tabel 5 Penghasilan Perambah Madu Lebah Hutan di Kawasan Meru Betiri Tahun 1997

No	Desa	Jumlah Perambah	Frekuensi/ Mg (Kali)	Hasil Frek (Botol)	Waktu (Bulan)	Hrg/btl (Rp)	Hasil/Thn (Rp)
1	Curahnongko	8	2	6	4-6	5.000	9.600.000
2	Sanenrejo	3	3	7	4-6	5.000	6.300.000
3	Andongrejo	6	3	7	4-6	5.000	12.600.000
4	Curahair	10	2	5	4-6	5.000	10.000.000
5	Wonoasri	3	2	6	4-6	5.000	3.600.000
Jumlah		30	12	31	-	-	42.100.000

Sumber: Sutikto, T, dkk. 1998. *Profil Kawasan Penyangga Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember*. (Buku II: Laporan Kemajuan). Jember: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tingkat II Jember dengan Lembaga Penelitian Universitas Jember, hlm. 82.

Tabel berikut menunjukkan di kawasan penyangga hutan Meru Betiri terdapat 30 pencari madu hutan yang dalam setahun diperkirakan mencapai pendapatan sebesar Rp. 42.100.000 (8.420 botol per 5.894 liter). Setiap minggu hasil setiap perambah antara Rp.60.000 sampai dengan Rp.100.000. Suatu pendapatan besar, tetapi pencarian madu tersebut sangat sulit dan kadangkala menginap di hutan. Madu hutan per botol dijual Rp. 5000, jika seminggu menghasilkan 12 botol, maka telah menghasilkan Rp. 60.000.

### 9. Berburu Satwa

Penduduk di kawasan penyangga hutan Meru Betiri banyak menangkap satwa liar di hutan khususnya burung. Hal ini didorong banyak permintaan burung jenis tertentu yang jarang dijumpai di tempat lain. Nilai ekonomi satwa liar semakin tinggi apabila dalam memperoleh jenis satwa yang semakin sulit dicari. Konsumen langsung maupun pedagang burung yang berada di luar kawasan mendatangi masyarakat yang berada di kawasan penyangga hutan untuk membeli burung yang diminati. Berikut disajikan data

berbagai jenis satwa liar di kawasan hutan Meru Betiri yang diburu oleh penduduk pinggiran hutan seperti dalam tabel berikut.

Tabel 6 Daftar Jenis Satwa Di Kawasan Meru Betiri Diburu Tahun 1997

No	Jenis Satwa	Asal Satwa	Daerah Pemasaran	Harga (Ribuan)
1	Cucak Hijau	Bandealit, Curah-nongko	Pondokrejo, Jember, Malang, Surabaya, Bali	50-75
2	Cucak Gadung/Sekar gading	Bandealit, Curahtakir, Sanenrejo	Curahnongko, Jember, Malang, Surabaya, Bali	40-50
3	Bunglor Batu	Bandealit, Curahtakir	Curahnongko, Jember, Malang, Surabaya, Bali	100-150
4	Bunglor Merah	Bandealit, Curahtakir, Sanenrejo	Curahnongko, Jember, Malang, Surabaya, Bali, Jakarta	100-150
5	Burung Hantu	Bandealit, Curahtakir, Sanenrejo	Curahnongko, Jember, Malang, Surabaya, Bali	40-50
6	Tekek Udang	Bandealit, Curahtakir, Sanenrejo	Curahnongko, Jember, Malang, Surabaya, Bali	20-30
7	Tekek Buto	Bandealit, Curahtakir, Sanenrejo	Curahnongko, Jember, Malang, Surabaya, Bali	20-30
8	Trenggiling	Bandealit, Curahtakir, Sanenrejo	Curahnongko, Jember, Malang, Surabaya, Bali	10-40

9	Kera	Bandealit, Curahnongko	Jember, Malang, Surabaya, Bali	25-50
10	Rajawali (Garuda Coklat)	Bandealit, Curahnongko, Curahtakir, Sanenrejo	Jember, Malang, Surabaya, Bali	75-100
11	Ayam Hutan	Bandealit, Curahnongko, Curahtakir, Sanenrejo	Jember, Malang, Surabaya, Bali	40-50
12	Kijang/Rusa	Bandealit, Curahnongko	Jember, Surabaya.	
13	Ular Phyton	Bandealit, Curahnongko, Curahtakir, Sanenrejo	Jember, Surabaya.	50-100
14	Macan Rem- rem/Kucing Hutan	Curahtakir, Sanenrejo	Jember, Surabaya.	25-40

---

Sumber: Wawancara dengan Pemikat Burung Pujiono 12 Nopember 2013.

Tabel tersebut menunjukkan Jenis burung yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah jenis Bunglor Merah dengan harga sekitar Rp.100.000 – Rp. 150.000 yang masih bakalan. Burung tersebut berasal dari daerah Andongrejo (Bande Alit), Curahnongko dengan daerah pemasaran umumnya dijual ke Jember, Malang, Surabaya, Bali. Selain Bunglor Merah, terdapat jenis burung lain yang banyak dipesan oleh penggemar seperti jenis Cucak Hijau dengan harga lebih murah (Rp50.000-Rp.75.000) jika dibandingkan dengan jenis Bunglor Merah. Selain burung, satwa lain yang diburu Trenggiling dengan nilai jual Rp 10.000 - Rp.40.000. Macan Remrem (Rp 25.000 – Rp.40.000). Para pemikat burung satwa tersebut menggunakan cara tradisional, sehingga waktu penangkapannya lama dan memerlukan cara tersendiri dengan tingkat keberuntungan tinggi. Bahkan seringkali para pemikat burung melakukan penangkapan burung pada malam hari dan penuh resiko. Namun omset satwa secara total sulit diprediksi, karena data sulit dilacak.

## **KESIMPULAN**

Kawasan hutan Meru Betiri selain memberikan tempat perlindungan bagi para penduduk yang tinggal di desa-desa pinggiran hutan (desa-desa penyangga), kemurahan alam (flora, fauna, mineral) Meru Betiri memberikan sumber penghidupan bagi penduduk yang tinggal di desa-desa penyangga. Pengrajin genteng di Dusun Mandilis dan Dusun Krajan, Desa Sanenrejo bisa mendapatkan bahan baku pembuatan genteng dengan mudah dan murah berupa tanah liat dan kayu bakar yang melimpah dari kawasan ini. Pengrajin gedhek dari Desa Sanenrejo, Andongrejo, Curahtakhir pergi ke hutan mencari bahan baku untuk pembuatan gedhek berupa bambu yang telah tersedia di kawasan hutan Meru Betiri.

Penduduk di desa-desa penyangga, memanfaatkan kemurahan hutan Meru Betiri dengan melakukan perambahan hutan. Mereka pergi ke hutan mencari kayu bakar untuk dijual ke pengrajin genteng di Desa Sanenrejo, atau untuk keperluan rumah tangga. Selain itu mereka mencari bambu ke hutan untuk dijual kepada para pengepul bambu yang selanjutnya dijual lagi kepada pengusaha tembakau. Madu lebah hutan dan rumput melimpah yang disediakan hutan Meru Betiri dapat menghidupi penduduk yang tinggal di desa-desa penyangga. Bahkan kawasan ini memberikan kemurahan berupa aneka satwa liar yang hidup di dalamnya untuk diburu dan hasilnya dijual ke pasar-pasar satwa di Jember, Malang, Surabaya, Bali.

Kemurahan alam Meru Betiri belum mensejahterakan penduduk di desa-desa penyangga. Minimnya sentuhan pembangunan prasarana dan sarana jalan, berdampak kawasan ini terisolasi dari ibu kota desa. Rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya prasarana dan sarana kegiatan ekonomi, sebagai faktor penyebab kemiskinan penduduk di desa-desa penyangga. Kemiskinan dan tingkat pendidikan rendah, membentuk persepsi penduduk desa-desa penyangga dalam pemanfaatan hutan yang eksploitatif. Hal ini berdampak terhadap kerusakan hutan, dan kepunahan anekaragam hayati, serta menimbulkan berbagai macam bencana alam. Meru Betiri berubah peran, dari melindungi dan memberi “berkah” berupa kemurahan alam yang diberikannya, berubah memberi musibah bagi penduduk di desa-desa penyangga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Buku dan Artikel

- Ananta Toer, Pramoedya, 1995. *Arus Balik*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Anonim, 1976. *Suaka Margasatwa Meru Betiri*, Jember: Sub-Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam, Jawa Timur II-Jember.
- Anonim, 1995. *Rencana Pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri 1995-2020* (Buku I). Jember: Proyek Pengembangan Taman Nasional Meru Betiri Tahun Anggaran 1994/1995.
- Anonim, 1999. *Informasi Kawasan Konservasi di Jawa Timur*. Surabaya: Balai Konservasi Sumber Daya Alam IV.
- Anonim, 2011. *Laporan Kegiatan Penyusunan Baseline Data Model Desa Konservasi Taman Nasional Meru Betiri*. Jember: Kemnterian Kehutanan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Balai Taman Nasional Meru Betiri.
- Bappenas, 1997. Upah Minimal Regional (UMR) Tahun 1997, Propinsi Jawa Timur, dalam <https://www.bappenas.go-id>, diunduh 21 Pebruari 2018.
- Departemen Kehutanan, tanpa tahun terbit. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Reencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan*. Tanpa kota dan badan penerbit.
- Departemen Kehutanan, 1988. *Deskripsi Kawasan Konservasi Lingkup Balai Konservasi Sumber Daya Alam IV*. Malang, tanpa badan penerbit.
- Poeponegoro, M.D dan Nugroho Notosusanto, 1984. *Sejarah Nasional Indonesia II* . Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan PN Balai Pustaka.
- Hidayat, H. 2011. *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Indrawan, M. dkk. 2012. *Biologi Konservasi* (Edisi Revisi). Jakarta: CONSERVATION International-Indonesia, PILI, Yayasan WWF Indonesia, Uni Eropa, dan YABSHI-Yayasan Bina Sains Hayati Indonesia.
- Maksum, M. (dkk.) 1999. *Studi Persepsi Masyarakat Desa Penyangga Taman Nasional Meru Betiri*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan & Kawasan Universitas Gadjah Mada.
- Nawiyanto, 2012. *Pengantar Sejarah Lingkungan* (Buku Ajar). Jember: UPT Penerbitan UNEJ.

- Ruhyat, Y. (dkk.). 1976. *Laporan Survey Su8aka Margasatwa Meru Betiri Jawa Timur*, Indonesia. Bandung: Lembaga Ekologi Unversitas Pajajaran.
- Sumartono, H. & Andang Subahianto, 2003, *Strategi Survival Komunitas Masyarakat Hutan (Studi Kasus di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember)*. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- Sutikto, T. (dkk.). 1998. *Profil Kawasan Penyangga Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember*. (Buku II: Laporan Kemajuan). Jember: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tingkat II Jember dengan Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- Syafi'i, I. & Subowo Kasim, 1981. *Tingkat Pendapatan dan Keadaan Sosial Masyarakat Sekitar Hutan di Daerah andilis Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember*. Jember: Kerjasama Jurusan Sosial-ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Negeri Jember dengan Word Wildlifs Funds, The Netherland, Sub. Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam Jawa Timur II di Jember.
- Utari, A.D.. 2012. *Penerapan Strategi Hutan Rakyat Opsi Penyelamatan Kehancuran Hutan Negara*. Yogyakarta: Cakrawala.

## 2. Daftar Wawancara

- Bunasir, Buruh Tani dan Penggaduh Sapi, Warga Dusun Mandilis Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, 21 Oktober 2013.
- Jumari, Pedagang Warga Dusun Krajan, Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabuapeten Jember.
- Jumriah, Buruh Tani, Warga Dusun Mandilis, Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, 11 Nopember 2013.
- Paeman, Buruh Tani, Penggaduh Sapi, Pengrajin Gedhek, Warga Dusun Mandilis, Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, 11 Nopember 2013).
- Paidi, Pencari Kayu Bakar Warga Dusun Mandilis, Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, 11 Nopember 2013.
- Ponirin, Kaur Ekonomi dan Pembangunan Desa Sanenrejo, 21 Oktober 2013.

Pujiono, Pemikat Burung, warga Dusun Mandilis, Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, 12 Nopember 2013.

Ruslan, Ketua RT 01, RW 02, Dusun Mandilis, Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, 20 Oktober 2013.

Sarengat, Kasun Mandilis, Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, 23-10- 2013.

Saswoko, Pencari Rumput, Warga Dusun Mandilis, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, 21 Nopember 2013.

Sunaryo, Sekdes Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, 23 Oktober 2013.

